



Ketua DPRD Sebut

Perencanaan Jembatan Garuda Belum Matang

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar ekspos Rencana Pembangunan Jembatan Garuda (Bardan-Siantan) dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, pada Senin (12/6).

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengungkapkan dari pemaparan yang disampaikan menurutnya perencanaan pembangunan Jembatan Garuda belum sepenuhnya matang karena masih banyak yang harus dibenahi. Dirinya pun menyoroti perihal kelengkapan berbagai dokumen yang harus dipenuhi dalam setiap rencana pembangunan.

"Pada intinya kami DPRD tidak menghambat kami hanya minta mereka mempersiapkan regulasi yang ada, agar ketika di bahas di DPRD sudah tidak ada kendala lagi, artinya Pemkot Pontianak harus siap membuat regulasi itu," ungkap Satarudin.

Satarudin mencontohkan salah satunya terkait kajian Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Desain (DED) yang masih belum bisa dilakukan. Lantaran hingga kini tim berwenang untuk melakukan kajian tersebut masih belum ditunjuk oleh Wali Kota Pontianak.

Padahal seharusnya keberadaan tim tersebut sangat dibutuhkan untuk mensinkronisasi dan mensinergikan hal-hal yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Jembatan Garuda.

"Secara teknis kita menunggu FS dan DED, apakah jembatan ini (kuat) sampai 100 tahun seperti tadi yang disampaikan," kata Satarudin.

Selain itu, Satar juga meminta kejelasan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) yang bakal diterapkan dalam pembangunan Jembatan Garuda. Hal tersebut menurutnya menjadi penting karena akan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset Pemerintah Kota Pontianak.

"Sistem KBPU ini diambil alih oleh pusat atau pemerintah daerah, kalau diambil oleh pemerintah daerah artinya jembatan itu akan menghasilkan PAD dan

aset akan menjadi milik kita, tapi kalau diambil alih oleh pemerintah pusat maka aset akan menjadi milik pemerintah pusat," ungkapnya.

Satarudin mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan Jembatan Garuda untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pontianak. Terlebih rencana pembangunan tersebut juga harus dituangkan kedalam peraturan daerah (perda) yang harus disampaikan ke DPRD Kota Pontianak.

"Silahkan pihak eksekutif dan PT Kapuas Berkah Ilahi untuk berkoordinasi dengan pihak lain terkait Perda yang harus disampaikan ke DPRD Kota Pontianak," kata Satarudin.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan saat ini progres pembangunan Jembatan Garuda tengah melengkapi data, baik secara administrasi maupun teknis seraya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Nantinya, pembangunan Jembatan Garuda akan berbentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Sebab proses pembangunan ini harus melalui mekanisme, persetujuan Menteri PUPR, tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan lainnya," ujarnya usai rapat Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jembatan Garuda di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, beberapa waktu lalu.

Edi menambahkan, melalui FGD yang digelar ini, semua pihak terkait turut membahas masalah teknis rencana pembangunan Jembatan Garuda, baik itu dampak, manfaat, regulasi dan berbagai hal untuk mempersiapkan pembangunan jembatan dengan desain mewah ini.

"Apabila sudah mendapat lampu hijau, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draft, kaitan kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pembangunannya akan dibiayai oleh investor dengan sistem KPBU. Rencananya Jembatan Garuda ini menggunakan sistem tol berbayar. Terkait tarif, pihaknya nanti akan mengkaji lebih matang berdasarkan kemampuan masyarakat.

"Sama halnya dengan ferry penyeberangan yang digunakan masyarakat saat ini untuk menyeberangi sungai dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara atau sebaliknya, masyarakat dikenakan tarif penyeberangan," katanya.

Untuk mematangkan perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah pusat juga masih berlangsung. Sementara pemrakarsa pembangunan melengkapi persyaratan teknis dan sebagainya.

"Pembahasan pembangunan Jembatan Garuda tidak hanya saat ini saja, tetapi akan ada diskusi lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan, melengkapi dan menyempurnakan pembangunan," kata Edi.

Jembatan Garuda ini mencerminkan kemajuan Kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah, apalagi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I juga tengah dibangun, sehingga kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai.

"Dampak ekonominya sangat besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas lebih lancar dan cepat. Selain itu pula akan menjadi landmark dan objek wisata," pungkasnya. **(din)**